KEPENTINGAN KOTA PADANG DALAM MEMBINA KERJASAMA SISTER CITY DENGAN KOTA HILDESHEIM

Oleh: Hasbi Kardi

Pembimbing: Dra. Den Yealta, M.Phil

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12.5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Diplomatic relations are a cooperative relationship carried out by each country in this era of globalization. Currently, it is not only countries that are able to establish diplomatic relations but region/city can also establish diplomatic relations with other regions/cities that are inside of a foreign country. This is done to gain profit and achieve the national interests of a region or city. One form of diplomatic cooperation between regions is a sister city, also often called a twin city. The city of Padang and the city of Hildesheim is one example of cooperation between two cities. The city of Padang has established sister city cooperation with Hildesheim since 1988 until now in various sectors in order to achieve the national interests of the city of Padang.

In this study, researchers will examine the reasons in which why the city of Padang cooperates with the city of Hildesheim and examine the national interests of Padang that has been achieved through the cooperation of sister cities of Padang and Hildesheim. This research was conducted using qualitative, data collecting methods, and library research where researcher collects data and information through in-depth understanding of books, journals, articles, and other sources of information that are relevant to this research.

The conclusion that the researcher was able to conclude in this study is that the sister city cooperation that has existed for 34 years has not given many significant results, the communication between the two parties has not been intensively carried out. This had also caused the vacancy of the cooperative relations between the city of Padang and Hildesheim in 2006. Then, in 2012 the sister city cooperation was re-established with the revitalization of the MoU which focused more on culture and empowering human resources. However, even after carrying out the revitalization, the results of this cooperatoin have not yet been clearly seen. Even so, through several cooperation programs at the beginning of the sister city coooperation, some of the national interests of the city of Padang was able to be materialized, such as in the fields of engineering and infrastructure, as well as social and culture.

Keywords : cooperation, sister city, Padang, Hildesheim, Paradiplomcy..

PENDAHULUAN

Hubungan diplomatik merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan tiap negara pada era globalisasi ini. Karena seiring dengan perkembangan yang pesat maka kebutuhan tiap negara juga berkembang dengan pesat. Agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi maka sebuah negara perlu untuk membentuk sebuah hubungan diplomatik dengan negara lain yang dapat memberi keuntungan kepada negaranya. Hubungan ini biasanya dilakukan dalam bentuk kerjasama melalui perjanjian antara satu negara dengan negara lainnya.

Kepentingan nasional merupakan salah satu faktor terpenting dan mendasar yang mendorong sebuah negara untuk melakukan interaksi dengan aktor-aktor lain dalam hubungan internasional. Kepentingan nasional seperti kepentingan ekonomi, kepentingan pertahanan dan keamanan, kepentingan internasional serta kepentingan ideologi merupakan suatu cita-cita suatu bangsa yang mana kepentingan tersebut dapat dicapai dengan melakukan hubungan dengan negara lain.¹

Hubungan diplomatik tidak hanya dapat dilakukan oleh negara sebagai subyek hukum internasional saja. Hubungan diplomatik juga dapat dilakukan antara pemerintah daerah dalam sebuah negara dengan pemerintah daerah di negara lain.

Salah satu bentuk kerjasama antara kota beda negara adalah *sister city*. *Sister city* dilaksanakan oleh pemerintah kotamadya/daerah tingkat II, pemerintah kota administratif dengan pemerintah kota yang setara atau setingkat di luar negeri.²

Di Indonesia sendiri kerjasama *sister city* dilakukan pertama kali oleh kota Bandung, yang mana pemerintah kota Bandung melakukan kerjasama dengan pemerintah kota Braunschweig, Jerman pada 2 Juni 1960³

Melihat keberhasilan Bandung dalam membangun kotanya berkat kerjasamanya dengan Braunschweig. Salah satu kerjasama *sister city* lainnya yang dilakukan di Indonesia adalah kerjasama *sister city* antara kota Padang dengan kota Hildesheim yang terletak di Jerman.

Kerjasama antara kedua kota ini merupakan sebuah kerjasama yang terjalin antar kota yang bersifat luas, disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang. Hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman sendiri sudah terjalin begitu lama sejak tahun 1952.

Kerjasama antara pemerintah kotamadya Padang dengan kota Hildesheim diawali dengan kunjungan tim penasehat hubungan persahabatan kota Bandung-kota Braunschweig ke kotamadya Padang. Pada bulan Mei 1984 Walikota Braunschweig datang ke kotamadya Padang atas undangan Gubernur kepala Daerah tingkat 1 Sumatera Barat Ir. Azwar Anas. Beberapa kunjungan ke kota Padang

¹ Nayun Cho (2016). Paradiplomasi kota Surabaya dan Kota Busan Dalam Kerjasama *Sister city*.

² Sidik Jatmika, otonomi daerah perspektif hubungan internasional, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2001, hal. 107.

³ Mariyo Saputra, Implementasi Kerjasama *Sister city* Bandung-Suwon Terhadap Pembangunan Sosial dan ekonomi di Kota Bandung, Bandung, 2017

pun dilakukan serta turut dilakukan traffic management study. Kunjungan tersebut diharapkan agar nantinya dapat menjadi kerjasama yang terarah.⁴

Kerjasama yang sudah dimulai sejak 20 Juni 1988 ini mencakup banyak bidang seperti :

1. Bidang teknik, yang diterapkan melalui perencanaan kota, perencanaan sistem air minum, penyempurnaan sistem drainase pembuangan sampah, pola transportasi dan tata kota.

2. Bidang pendidikan diantaranya peningkatan keahlian staf pemerintahan daerah, membantu pengembangan perguruan tinggi serta sekolah-sekolah kejuruan atau pendidikan formal.

3. Bidang sosial budaya yang menyangkut instansi pembinaan kesenian daerah, peningkatan prestasi olahraga dan sebagainya.⁵

Setelah berlangsung selama beberapa tahun, pada tahun 2006 kerjasama sister city Padang-Hildesheim ini sempat terhenti atau vakum namun dilanjutkan lagi (revitalisasi) pada tahun 2012. Hal ini dilatarbelakangi oleh gempa yang terjadi di kota Padang pada tahun 2009, yang mana pada waktu itu pihak Hildesheim melakukan kunjungan ke kota Padang dan memberikan bantuan kemanusiaan, pada saat tersebut pula pihak Hildesheim merencanakan kelanjutan kerjasama sister city antara Padang dengan Hildesheim. Perjanjian ini

kembali dilanjutkan pada tahun 2012 yang lantas menghasilkan MoU baru yang disebut dengan Minutes Agreements.

Sejalan dengan tujuan syarat terjalannya kerjasama sister city antara dua kota yaitu memiliki beberapa persamaan seperti dalam bidang ekonomi, hukum, budaya, agama atau geografis. Selain karena kota Padang dan kota Hildesheim yang sama-sama memiliki banyak bangunan kuno bersejarah dan sangat membudidayakan budaya khas kota masing masing, pemerintah kota Padang menganggap bahwa kota Hildesheim memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pemerintah kota Padang.

Alasannya adalah karena kota Hildesheim merupakan kota industri yang menjadi rumah bagi banyak perusahaan industrial besar contohnya Coca-Cola. Yang mana hal tersebut memiliki kesamaan dengan kota Padang yang juga menjadi rumah bagi perusahaan perusahaan industri terkemuka misalnya saja perusahaan Semen Padang. Selain itu, kota Hildesheim juga memiliki tata kota yang baik yang lantas membantu kota Hildesheim untuk menghadapi berbagai bencana alam, yang mana hal tersebut membuat Padang merasa perlu untuk mempelajari hal tersebut dari kota Hildesheim.

⁴ Eni Putri Santi (2018). Kerjasama Pemerintah Kota Madya Padang Kota Hildesheim Jerman dalam Bidang Sosial Budaya Tahun 1987-1995. Padang.

⁵ Padang Kota Tercinta 1994:13 Diakses pada 4 Desember 2021

KERANGKA TEORI

1. Perspektif Liberalisme

Mansbach dan Rafferty mengatakan dalam liberalisme mereka mempercayai bahwa dalam aspek politik, aktor dapat mendapatkan untung bersama atau mendapat kerugian bersama hal ini dikenal dengan variable-sum game.

Penjelasan lainnya dari salah satu varian liberalisme, yaitu neoliberalisme, bahwa setiap aktor saling bergantung dengan aktor yang lainnya dalam hal mempertahankan keberlangsungannya dan juga memiliki takdir yang dibagi bersama.⁶

Dunne juga memperkuat pernyataan tersebut dengan menyebutkan motivasi dari negara melakukan kerjasama adalah karena “absolute gains” yang didapat ketimbang melihat “relative gains” yang didapat oleh pihak lain .⁷ Sehingga dari pernyataan-pernyataan di atas dapat dilihat bahwa kerjasama dalam suatu hubungan internasional lebih dilihat sebagai pertemuan keuntungan yang akan didapat oleh kedua aktor.

2. Teori Kepentingan Nasional

Dalam menjalankan hubungan internasional suatu negara/aktor harus memiliki kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan

salah satu bagian yang paling penting dalam menjalankan interaksi-interaksi hubungan internasional.

Kepentingan nasional merupakan suatu tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu negara dalam melakukan interaksi hubungan internasional. Selain itu, teori tentang kepentingan nasional ini bersifat abstrak dan tidak bisa diketahui dengan pasti. Kepentingan nasional tidak akan bisa di jalankan atau di capai apabila suatu aktor negara tidak memiliki kebijakan dan kekuatan.

Kepentingan nasional dibedakan menjadi 2, yakni kepentingan vital dan kepentingan sekunder. Kepentingan vital merupakan kepentingan yang menjadi prioritas utama dan sangat penting keberadaannya bagi suatu negara. Contohnya suatu negara akan melindungi kedaulatannya, mempertahankan wilayah dan harga diri negara tersebut. Sedangkan kepentingan sekunder merupakan kepentingan yang berasal dari masyarakat yang mengutamakan kepentingan masyarakat.⁸

Kepentingan nasional merupakan faktor yang sangat penting bagi suatu negara/aktor karena tanpa adanya kepentingan nasional maka suatu negara tidak akan mampu melakukan interaksi internasional. Kepentingan nasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan negara itu sendiri, suatu negara akan membutuhkan negara lain untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.

⁶ Mansbach, Richard W. dan Rafferty, Kirsten L. 2008. *Introduction to Global Politics*. New York:Routledge

⁷ Dunne, Tim. 2001. “Liberalism”. Dalam John Baylis dan Steve Smith (penyunting). *The Globalization of World Politics, An Introduction to*

International Relations (2nd edition). Oxford:Oxford University Press.

⁸ Nincic, Miroslav (1999). “The National Interest and Its Interpretation”, *The review of Politics*, Vol. 61, No. 1; pp. 29-55.5

3. Teori Kepentingan Sosial-Budaya

Menurut teori ini masyarakat dipandang sebagai sistem sosial atau institusi yang terdiri dari berbagai bagian atau elemen yang satu dengan elemen lainnya saling berkaitan, tergantung dan berada dalam keseimbangan (equilibrium).

Teori sosial budaya dipahami dan dipakai sebagai berikut :

a) *A temporal dimension* fokus pada waktu (past, present, future). Past memberi basis pengalaman. Present meletakkan konfigurasi. Future membangun horison (wawasan) bereferensi pada past and present.

b) *A material dimension* fokus pada ruang fisik (physical space) yang mewadahi kegiatansosial.

c) *A symbolic dimension* fokus pada simbol-simbol yang dipergunakan untuk mengikat kehidupan sosial misal: kekuasaan, kekayaan, pengaruh (nilai, norma, pengetahuan).

Tiga dimensi tersebut dipergunakan untuk membedah keberadaan sistem sosial, sistem budaya dan sistem perilaku sosial kemudian diletakkan sebagai dasar membuat eksplanasi dan prediksi kedepan.⁹

4. Konsep Paradiplomasi

⁹ Dr. Mohammad Syawaludin (2017) Teori Sosial Budaya dan Methodenstreit. Hal :9

¹⁰ Damayanti crishty 2012. "Potensi paradiplomasi dalam mendukung kinerja diplomasi Indonesia dalam komunitas asean".

¹¹ Mukti, T. A. (2013).Paradiplomacy, Kerjasama

Paradiplomasi merupakan hubungan internasional yang dijalin oleh instansi sub-nasional, regional, lokal demi mencapai kepentingannya.¹⁰ Istilah "paradiplomacy" pertama kali muncul pada tahun 1980-an pada diskusi akademis oleh para ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos. "paradiplomacy" merupakan penggabungan dari istilah "parallel diplomacy" yang memiliki makna kebijakan luar negeri oleh pemerintah non sentral, menurut Aldecoa, Keating dan Boyer.¹¹

Paradiplomasi merupakan hasil dari hadirnya era globalisasi, dimana pada era globalisasi tidak hanya negara saja yang dapat menjadi aktor dalam membangun hubungan internasional, tetapi pemerintah daerah juga dapat menjadi aktor dalam hubungan Internasional.

Melalui konsep ini peneliti ingin mengembangkan dan menjawab pertanyaan kepentingan apa dan faktor apa yang menyebabkan terjalannya kerjasama sister city antara pemerintah kota Padang dengan pemerintah kota Hildesheim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sister City Dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia

Dalam mencapai tujuan dan kepentingan nasional sebuah negara, terdapat tiga elemen penting yang saling berkaitan satu sama lain yaitu hubungan kerjasama antar dua negara atau lebih, politik dan kebijakan luar negerinya, dan diplomasi.¹²

Setiap negara memiliki politik luar negeri yang menjadi cerminan dari

Luarnegeri Oleh Pemdadi Indonesia.Yogyakarta:The Phinisi Press Yogyakarta. Diakses pada 30 Oktober 2018.

¹² Aldecoa Fransisko. The foreign relations of subnational government. Frank Cass.1999

kondisi yang ada di dalam negerinya. Pandangan politik luar negeri di Indonesia tentu saja tidak lepas dari Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia, dimana pelaksanaannya tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam lima butir sila Pancasila. Sedangkan sifat dari politik luar negeri yang dianut oleh Indonesia merupakan politik yang bersifat bebas aktif, hal ini berarti politik luar negeri Indonesia tidak dipengaruhi oleh ideologi ataupun blok manapun.¹³

Aturan tentang bagaimana Indonesia mengatur alur kerjasama internasional diatur dengan UU. Nomer 24 Tahun 2000 yang membahas persoalan perjanjian Internasional. Segala sesuatu tentang perjanjian dan kerjasama internasional harus sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2004.¹⁴

Kerjasama sister city di Indonesia diawali di masa otonomi daerah belum berlaku di Indonesia. Pada masa itu pemerintah daerah belum memberikan kewenangan untuk bisa mengatur masing-masing daerah seperti sekarang ini. Pemerintah daerah hanya diberikan sedikit kewenangan karena sebagian besarnya dikuasai oleh pemerintah pusat.

Baru setelah adanya Undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri-lah kewenangan pemerintah daerah Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain di luar negeri mulai terlihat. Kewenangan pemerintah daerah diperjelas oleh

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Dan dipertegas lagi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diikuti dengan Peraturan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri mengenai hal-hal teknis.¹⁵

2. Hubungan Kerjasama Kota Padang Dengan Kota Hildesheim

Kerjasama pemerintah kota Padang dengan kota Hildesheim mulai terjadi ketika tim penasehat hubungan persahabatan kota Bandung-kota Braunschweig melakukan kunjungan di Kota Padang. Wali kota Braunschweig datang mengunjungi Kotamadya Padang pada bulan Mei 1984 untuk memenuhi undangan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sumatera Barat Ir. Azwar Anas.

Pemerintah kota Hildesheim menanggapi positif ajakan kerjasama oleh pemerintah kota Padang. Terbukti dengan didatangkannya tim ahli dari Kota Hildesheim pada bulan Agustus 1986 dengan tujuan pengumpulan materi program kerjasama sekaligus mengadakan seminar di perguruan tinggi negeri dan swasta di kota Padang.

Kerjasama sister city dilatarbelakangi oleh dialog antara pemerintah kota Padang dengan kota Hildesheim yang membahas isu budaya dan isu perdamaian dunia. dalam dialog tersebut tak luput juga membedah bahasan mengenai beberapa bidang-bidang yang akan menjadi subjek kerjasama nantinya.

Pada 20 Juni 1988 Walikota Padang Syahrul Ujud, S.H dan

¹³ Politik luar negeri Indonesia.1987. Badan penelitian dan pengembangan departemen luar negeri Indonesia, hlm 23

¹⁴ Panduan umum tata cara hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah. Dapertemen luar negeri,

2003, hal. 43

¹⁵ Renata Edzgar, Urgensi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Sister City di Indonesia, Malang, 2014

Walikota Hildesheim Dr. Wilhelm Buerstedde meresmikan kerjasama antara kota Padang dengan kota Hildesheim.¹⁶

Kota Padang menjalin kerjasama dengan kota Hildesheim karena merasa memiliki berbagai persamaan dengan kota Hildesheim, seperti bagaimana kedua kota sama-sama mengandalkan sektor industri dan pariwisata sebagai sumber kekayaan utamanya, banyaknya bangunan kuno bersejarah di kedua kota ini, pelestarian budaya yang tetap terjaga hingga saat ini dan persamaan-persamaan lainnya.

Selain itu, kota Padang merasa kerjasama dengan kota Hildesheim memiliki potensi dalam memenuhi kepentingan-kepentingan kota Padang. Seperti contohnya, kota Hildesheim yang memiliki tata kota dan perencanaan kota yang baik sehingga saat terjadi bencana alam mereka dapat mengatasinya dengan baik.

Potensi lainnya yang dilihat kota Padang adalah kota Hildesheim yang merupakan kota industri, rumah bagi perusahaan-perusahaan industri ternama di dunia. Alasan lainnya yang mendasari kerjasama antara kota Padang dan Hildesheim adalah ketertarikan pemerintah kota Hildesheim dengan kebudayaan-kebudayaan dari bangsa lain, salah satunya adalah kebudayaan dari kota Padang.

Dengan pertimbangan berbagai kesamaan dan potensi yang dimiliki kota Hildesheim sebagai mitra kerjasama sister city tersebut

maka kota Padang memilih untuk menjalin kerjasama dengan kota Hildesheim dan menjalankan berbagai program kerjasama yang dapat mewujudkan kepentingan nasional kota Padang. Dalam kerjasama ini, ada beberapa bidang yang akan dijadikan subjek kerjasama, antara lain:¹⁷

a. Bidang pendidikan

Pemerintah kota Padang dan pemerintah kota Hildesheim melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan cara melakukan pertukaran informasi dan hasil riset keilmuan, Selain itu, juga diadakan program 'industry trainership' (Magang pada sektor industri).

b. Bidang Teknik dan Infrastruktur.

Diadakannya studi banding dalam rangka mempelajari teknik pengadaan air minum yang diikuti oleh tiga orang staff PDAM kota Padang yaitu Bukhari Tawi, Edy Marno, Mardias, bantuan untuk perbaikan GOR H. Agus Salim, mengirimkan staf pemerintah kota Padang ke Hildesheim untuk mengikuti short course di bidang manajemen lingkungan, pengolahan limbah, sanitasi, dan tata ruang.¹⁸

Selain itu, Padang menerima bantuan untuk perbaikan sungai Batang Arau dan peningkatan kualitas air sungai Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang berupa dana segar sejumlah 10ribu euro atau setara dengan Rp. 170 juta dari pemerintah.kota Hildesheim.¹⁹

¹⁶ Laporan Kegiatan Kerjasama Kota Padang-Hildesheim 1987-1995, hlm 1-2

¹⁷ Laporan Program Kerjasama antara Kota Pemerintahan Daerah Kotamadya Tk II Padang-Indonesia dan Pemerintahan Kota Hildesheim-Jerman 1987-1995

¹⁸ Ghina Okthawilanda. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Luar Negeri Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Bung Hatta Dengan Universitas HAWK Hildesheim Jerman Ditinjau Dari Hukum Internasional. 2015. Padang.

¹⁹ www.analisakini.id/2021/06/ Diakses pada 8 Juli

c. Bidang Sosial Budaya Kerjasama di bidang kebudayaan adalah dengan melakukan pertukaran kebudayaan. Walikota Padang saat itu mengundang Dr, Gunter dari Hildesheim untuk menyaksikan pertunjukan kesenian budaya minang di kediaman Walikota Padang di jalan Ahmad Yani. , mengirimkan misi kesenian ke kota Hildesheim dengan menyelenggarakan pentas kesenian yang menampilkan kesenian-kesenian dari kota Padang, dan membuat pameran miniatur rumah adat Minangkabau di balai kota Hildesheim dan Universitas HAWK dimana miniature rumah gadang ini dirancang oleh mahasiswa dan dosen dari Universitas Bung Hatta pada tahun 2013.

Pada bidang sosial Hildesheim memberikan beberapa bantuan dana untuk kota Padang. Contohnya, Hildesheim memberikan bantuan dana untuk bantuan bencana gempa pada tahun 2009 dan bantuan dana untuk perbaikan PDAM kota Padang pada tahun 1992.

3. Pencapaian Kepentingan Nasional Kota Padang Melalui Kerjasama Sister City

Meski hanya berjalan baik di awal masa kerjasama, melalui program-program yang telah dibuat bersama oleh kota Padang dan Hildesheim berhasil mendapatkan beberapa manfaat dari program yang sukses terlaksana dan terbukti membantu kota Padang dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Manfaat-manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bantuan Dana Untuk PDAM Padang

Padang melakukan pengajuan surat rekomendasi kepada pemerintah kota Hildesheim dengan surat nomor. 0746.27/PDAM-92 pada tanggal 20 Mei 1992 perihal bantuan dana untuk pengelolaan air bersih dan peningkatan kapasitas produksi. Pemerintah kota Hildesheim menanggapi positif surat rekomendasi tersebut dan bersedia memberikan bantuan kepada pemerintah kota Padang. Padang memperoleh bantuan dana untuk pengelolaan air bersih dan peningkatan kapasitas produksi yang diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kotamadya Padang oleh pemerintah kota Hildesheim.

b. Perbaikan Lapangan Sepak Bola GOR H. Agus Salim.

Rencana perbaikan GOR Haji Agus Salim ini dibahas pada rapat evaluasi kerjasama sister city antara Padang dan Hildesheim yang dilakukan pada tahun 1994. Hasil dari rapat ini, pemerintah Hildesheim memutuskan untuk memberikan bantuan berupa sumbangan dana sebesar Rp. 50.000.000,00 kepada pemerintah kota Padang guna memperbaiki Lapangan Sepak Bola GOR Haji Agus Salim. Dengan adanya bantuan ini diharapkan sarana dan prasarana di kota Padang khususnya pada bidang olahraga dapat menjadi semakin maju dan memberikan berbagai dampak positif bagi atlet-atlet kota Padang.

c. Bantuan perbaikan sungai Batang

Pemerintah kota Hildesheim juga mengirimkan bantuan berupa dana segar sebesar 10 ribu euro atau setara dengan Rp. 170 juta untuk memperbaiki

dan meningkatkan kualitas air di Sungai Batang Arau. Bantuan ini diterima pada 17 Juni 2021 dan diterima dari walikota Hildesheim yaitu Mr. Ingo Meyer secara virtual. Dengan bantuan dana ini pemerintah kota Padang berencana untuk melakukan beberapa metode yang dapat memperbaiki sungai Batang Arau.

d. Menerima Misi Kesenian dari Kota Hildesheim

Pemerintah kota Padang mencoba untuk mempromosikan kebudayaan khas yang dimiliki oleh kota Padang melalui kerjasama sister city ini, begitupun sebaliknya dengan kota Hildesheim. Pada kunjungan yang dilakukan oleh kota Hildesheim di tahun 1994, pemerintah kota Hildesheim memberikan berbagai wawasan tentang kebudayaan masyarakat Hildesheim kepada pemerintah kota Padang, dan hal ini disambut dengan baik oleh pemerintah kota Padang demi menyukseskan kerjasama antara kedua belah pihak dalam bidang budaya.

e. Mengirimkan Misi Kesenian ke Kota Hildesheim.

Selain mengadakan acara kebudayaan di kota Padang, salah satu bentuk kerjasama sister city yang dilakukan kota Padang dan Hildesheim pada bidang kebudayaan adalah mengirimkan seniman-seniman dari kota Padang dan menggelar acara kesenian di kota Hildesheim. Pada pagelaran acara ini, kota Padang

seperti contohnya sama sama memiliki banyak bangunan dan monumen bersejarah yang masih dilestarikan, dan sama sama

berkesempatan untuk memperkenalkan kebudayaan khas dari kota Padang, yaitu kebudayaan Minangkabau. Dalam kerjasama ini, pihak pemerintah Kota Padang mengirimkan sebuah grup seni yang akan menampilkan kebudayaan Minangkabau di kota Hildesheim dan disaksikan oleh masyarakat Hildesheim.

KESIMPULAN

Hubungan diplomatik merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan tiap negara pada era globalisasi ini. Karena seiring dengan perkembangan yang pesat maka kebutuhan tiap negara juga berkembang dengan pesat.

Agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi maka sebuah negara sebagai aktor politik internasional perlu untuk membentuk sebuah hubungan diplomatik dengan negara lain yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya.

Tidak hanya antar negara, hubungan diplomatik juga dapat dilakukan antar daerah. Salah satu bentuk kerjasama diplomatik internasional yang dapat dilakukan antar daerah adalah kerjasama sister city. Sister city dilaksanakan oleh pemerintah kotamadya/daerah tingkat II, Pemerintah kota administratif dengan pemerintah kota yang setara atau setingkat di luar negeri.

Salah satu bentuk kerjasama sister city yang dilakukan di Indonesia adalah Kerjasama sister city yang dijalin antara kota Padang dan kota Hildesheim yang telah dimulai sejak 20 Oktober 1988.

Kerjasama ini terjalin karena Padang merasa Hildesheim memiliki banyak kesamaan dengan Padang merupakan kota Industri. Alasan lainnya adalah karena Padang percaya bahwa dengan bekerjasama dengan Hildesheim akan dapat memberikan manfaat dan dapat mewujudkan

kepentingan-kepentingan nasional kota Padang.

Kerjasama yang dijalin antara kota Padang dan kota Hildesheim sudah terjalin selama 34 tahun. Walaupun kerjasama ini pernah terputus pada tahun 2006 tetapi mulai terjalin kembali pada tahun 2012 dengan MoU baru yang bernama Minutes Agreements. Putusnya hubungan kerjasama antara kota Padang dan kota Hildesheim pada tahun 2006 dikarenakan kerjasama ini dinilai kurang berjalan dengan baik dan tidak berhasil memenuhi kepentingan nasional kota Padang dan Hildesheim.

Melalui penelitian yang peneliti lakukan, peneliti melihat bahwa program-program yang direncanakan oleh Padang dan Hildesheim hanya terealisasi pada masa-masa awal kerjasama tersebut terjalin. Hal ini juga yang menyebabkan sempat putusnya hubungan kerjasama antara kedua kota ini.

Setelah kerjasama Padang dan Hildesheim dijalin kembali pada tahun 2012, kedua pemerintah daerah memperbaharui kandungan dari perjanjian kerjasama sister city ini. Dimana pada MoU ini rencana kerjasama antara Padang dan Hildesheim difokuskan pada bidang budaya, wisata, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Tetapi walaupun begitu hingga saat ini peneliti tidak menemukan data yang dapat membuktikan bahwa kerjasama sister city antara Padang dan Hildesheim memberikan hasil yang signifikan dalam mewujudkan kepentingan nasional kota Padang sebagai aktor internasional non-state pasca dekade awal saat kerjasama ini dibentuk.

Peneliti membuat impulan bahwa pemerintah kota Padang mendapatkan banyak manfaat dari berjalannya kerjasama sister city dengan Hildesheim pada dekade awal terbentuknya kerjasama tersebut. Seiring berjalannya waktu, pemerintah kota Padang terkesan kurang serius dalam pelaksanaan kerjasama tersebut. Terbukti dengan tidak efektifnya intensitas komunikasi yang selama ini dilakukan pemerintah kota Padang dengan pemerintah kota Hildesheim dan juga sifat insidental yang mewarnai revitalisasi atau tindak lanjut kesepakatan sister city.

DAFTAR PUSTAKA

Administrative Arrangement Between The Municipal Government Of Padang, West Sumatra, Indonesia And The Municipal Government Of Hildesheim, Lower Saxony, Federal Republic Of Germany Concerning City Cooperation. (1988). Arsip Dokumen Kerjasama.

Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah. (2003). 43.

(2011). Sister city Kota Bandung. Sekretariat Kota Bandung.

Bakry, A. R. (2009). Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: MIPI.

Batsell, & Jake. (2014). Sister City Programs : Relks of The Past?

ashington: ProQuest Document.

Clinton, W. D. (1986). *The National Interest; Normative Foundations* .

E, S. (2018). *Kerjasama Pemerintah kotamadya Padang dengan Kota Hildesheim Jerman dalam Bidang Sosialbudaya Tahun 1987-1995. Padang.*

Indonesia, B. P. (1987). *Politik Luar Negeri Indonesia*. 43.

Karomah, T. (2017). *Kerjasama Pertahanan Indonesia-Jerman Melalui Deklarasi Jakarta Tahun 2012-2016. Jom FISIP Vol 4 No 2, Pekanbaru.*

Laporan Evaluasi Kegiatan Kerjasama Pemerintah Daerah Kotamadya Padang dengan Pemerintah Hildesheim.

Laporan Hasil Kerjasama Sister city Kotamadya Padang dengan Kota Hildesheim.

Laporan Program Kerjasama antara Kota Pemerintahan Daerah Kotamadya Tk II Padang-Indonesia dan Pemerintahan Kota Hildesheim-Jerman.

Laporan Kegiatan Kerjasama Kota Padang-Hildesheim . (1987-1995). 1-2.

Macinnis, & Adam. (2014). *What is sister city*. Washington: ProQuest Documents.

Mochtar, K. (1993). *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya*. Bandung: Penerbit Alumni.

Mukti, T. (2013). *paradiplomacy, kerjasama luarnegeri oleh pemdadi Indonesia*. Yogyakarta: The Phinisi Press.

Padang Kota Tercinta 1994:13

Rudy, T. M. (1993). *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan internasional*. Bandung.

S, E. P. (2018). *Kerjasama Pemerintah Kotamadya Padang dengan Kota Hildesheim Jerman dalam Bidang Sosial-Budaya Tahun 1987-1995. Padang.*

Surat Rekomendasi Mengenai Kerjasama Luar Negeri antara PDAM Padang dengan Hildesheim Jerman. Arsip Dokumen Kerjasama.

Syawaludin, D. M. (2017). *Teori Sosial Budaya dan Methodenstrei*